

PENGARUH DAU, PAD, DAK TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PROVINSI JAWA TENGAH

Andri Gustaf Eka Saputera¹, Pandoyo²

¹Indonesia Banking School

²Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

andrygustav@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the simultaneous and partial impact DAU, PAD, and DAK on the economic growth rate of Central Java province. The model in this study focused on regression analysis with a combination of time series and cross-section data, which is popularly called pooled having regular temporal observation in an analysis unit with cross-section time-series data. The results showed that the three independent variables, DAU, PAD, and DAK, affected economic growth. the total influence of the three Independent variables is indicated by the coefficient of determination of 0.2833. This value indicates that the total variation in the influence of all Independent variables on economic growth is 28.33 percent. This means that the influence of other variables outside the model not examined is equal to 71.67 percent. Such as Regional Levy, and Foreign Investment. Partially DAU negatively affects Economic Growth, this is indicated by the regression coefficient value of -0.1544 . This means that each increase of one unit of DAU will decrease economic growth by 15.44 percent. PAD has a positive effect on economic growth, this is indicated by the regression coefficient value of 0.1337. This means that each increase of one unit of PAD will increase economic growth by 13.37 percent. DAK does not affect economic growth, it is indicated by its probability value of 0.7240 ($0.7240 > 0.05$).

Keywords: DAU, PAD, DAK, Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, PAD, dan DAK secara simultan dan parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah. Model dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data time series dan cross section, yang populer disebut dengan *pooled* memiliki obsevasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data *cross section time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU, PAD, dan DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Besaran pengaruh total ketiga variabel Independent ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,2833. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi total pengaruh seluruh variabel Independent terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 28,33 persen. Ini berarti pengaruh variabel lain diluar model yang tidak diteliti adalah sebesar 71,67 persen. Seperti Retribusi Daerah, dan Penanaman Modal Asing. Secara parsial DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar $-0,1544$. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan DAU akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 15,44 persen. PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,1337. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 13,37 persen. DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,7240 ($0,7240 > 0,05$).

Kata Kunci: DAU, PAD, DAK, Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Akuntansi keuangan (pemerintah) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang ,mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerinath Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah (Halim, 2007).

UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). (Halim, 2007).

Dalam perkembangan perotonomian Indonesia Jawa Tengah merupakan daerah yang mempunyai kabupaten cukup banyak dan luas di pulau jawa. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten) yakni

Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menurut (Aryanto, 2011), desentralisasi kebijakan memberikan kesempatan besar bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kondisi keuangan. Otoritas local mengatur dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Objek dari penelitian ini adalah untuk mngetahui kondisi keuangan otonomi local dan kemampuan dalam membuat pemetaan keuangan lokal. Adapun indicator yang digunakan adalah peranan kapasitas keuangan (pembagian) daripada PAD untuk keperluan wilayah dan pertumbuhan pendapatan lokal. Kondisi yang menarik yaitu daerah yang mempunyai sumberdaya alam melimpah (PAD nya tinggi) tidak bisa langsung menduduki kondisi kinerja PAD yang baik. Kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung kepada tingkat rasio kemandirian keuangannya.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan Instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran merupakan aktivitas pemerintah yang penting dan universal. Setiap pemerintah harus menjalankan fungsi penganggaran dalam melakukan aktivitas dan membelanjakan pendapatan. Akuntabilitas merupakan dasar dari konsep anggaran yang diterima. Sifat-sifat seperti periodik, legal, pengendalian penganggaran, dan dana yang dikonsolidasi merupakan sarana yang penting untuk pemeliharaan akuntabilitas finansial dari eksekutif pada legislatif (Mahsun, Sulistyowati, & Purwanugraha, 2006).

Ada 3 variabel untuk menghitung atau mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pusat untuk daerah dalam mengembangkan daerah dalam segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain lain. Sedangkan menurut Nurcholis (2007:182), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. DAK atau Dana Alokasi Khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya

diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang.

Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional (Mahsun, 2009). Artinya, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pendekatan analisis anggaran, analisis laporan keuangan, metode balance scorecard dan performance audit (Mahsun, 2009).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa tengah dan faktor yang mempengaruhinya. Dimana peneliti mengambil sample 11 kabupaten di Jawa tengah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan perbandingan berdasarkan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang penelitian diatas adalah bagaimana pengaruh DAU, PAD, dan PDRB terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada provinsi Jawa Tengah periode (2007 – 2012). Apakah DAU, PAD, dan DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.

TUJUAN PENELITIAN

1. Pengaruh DAU, PAD, dan DAK secara simultan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55/2005).

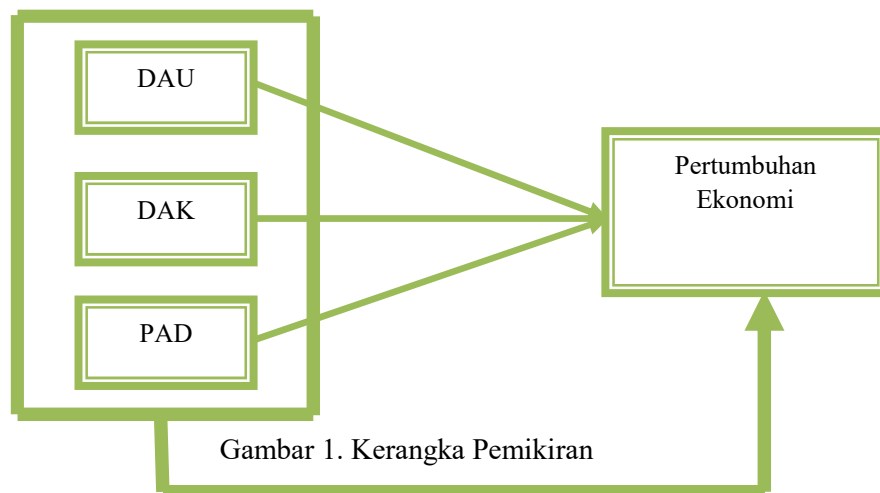
Alokasi DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber

pembiayaannya. Dasar hukum dalam Dana Alokasi Umum adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001).

Penelitian ini didasarkan pada analogi bahwa transfer pemerintah pusat (DAU) kepada pemerintah daerah seharusnya menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Adanya peningkatan belanja daerah (seperti pembangunan infrastruktur publik) akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, sehingga secara bertahap pemerintah pusat mengurangi dana transfer tersebut.

Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah (Priyo, 2009). Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo, 2009).



Hipotesis 1 :

H_0 : DAU berpengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

H_1 : DAU tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 2:

H_0 : PAD berpengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

H_1 : PAD tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 3:

H_0 : DAU, PAD, dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

H_1 : DAU, PAD, dan DAK tidak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 4 :

H_0 : DAK berpengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

H_1 : DAK tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari DAK, DAU, dan PAD. Data tersebut juga merupakan data runtun waktu (time series), yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam hal ini data yang digunakan berupa periode tahun 2007-2013.

Sumber data berasal dari literatur maupun buku-buku yang menjadi rujukan relevan untuk penelitian. Data-data juga diperoleh dari portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di www.djpk.depkeu.go.id.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan

menggunakan regresi linier berganda berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X₁ = DAU

X₂ = PAD

X₃ = DAK

e = error

Model dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data time series dan cross section,

yang populer disebut dengan *pooled* memiliki obsevasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data *cross section time series*. *Pooled time series* merupakan kombinasi antara *time series* yang memiliki observasi-observasi pada unit analisis di titik tertentu (Syars dalam Mudrajat Kuncoro, 2001). Ciri khusus pada data time series adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedang data cross section adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Method: Least Squares

Date: 09/13/14 Time: 22:00

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.10858	1.603308	14.41307	0.0000
PAD	0.133736	0.035638	3.752593	0.0009
DAU	-0.154371	0.061203	-2.522290	0.0181
DAK	-0.014067	0.039404	-0.356985	0.7240
R-squared	0.357401	Mean dependent var	21.84653	
Adjusted R-squared	0.283255	S.D. dependent var	0.065103	
S.E. of regression	0.055117	Akaike info criterion	-2.835147	
Sum squared resid	0.078985	Schwarz criterion	-2.648321	
Log likelihood	46.52721	Hannan-Quinn criter.	-2.775380	
F-statistic	4.820240	Durbin-Watson stat	1.809692	
Prob(F-statistic)	0.008455			

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerinath Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah didalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, et al (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah.

Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti hipotesis kedua dalam penelitian tidak terjawab. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah bahwa DAU yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat belum dipergunakan secara maksimal dalam mengembangkan sektor riil yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi

yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam pertumbuhan ekonominya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti hipotesis kedua dalam penelitian telah terjawab. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti hipotesis ketiga dalam penelitian tidak terjawab. Pemanfaatan DAK belum sepenuhnya diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara Simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU, PAD, dan DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. besaran pengaruh total ketiga variabel Independent ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,2833. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi total pengaruh seluruh variabel Independent terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 28,33 persen. Ini berarti pengaruh variabel lain diluar model yang tidak diteliti adalah sebesar 71,67 persen. Seperti Retribusi Daerah, dan Penanaman Modal Asing.

Secara parsial DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar $-0,1544$. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan DAU akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 15,44 persen.

Secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar sebesar 0,1337. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 13,37 persen.

Secara Parsial DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar sebesar 0,7240 ($0,7240 > 0,05$).

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran- saran dalam penelitian adalah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi ditinjau kembali agar dilakukan tujuan pemerataan tercapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan lebih memperhatikan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi Daerah, dan Penanaman Modal Asing. Pemanfaatan DAK belum sesuai dengan tujuan pemberian DAK yaitu untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta.
- Dirjen Perimbangan Keuangan, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berbagai tahun penerbitan.

<http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>

- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam*. Erlangga. Jakarta.
- Gujarati dan Porter. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. (2002) *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama* , Salemba empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. (2012). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Husein Umar. (2005). *Metode Penelitian*. Salemba Empat. Jakarta
- Kountur. Ronny. (2009). *Metode Penelitian - Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Buana printing. Jakarta.
- Mamesah, D.J., (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nazir, Moch. (2003). *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta, 63.
- Nunuy Nur Afiah & Halida Arsyi. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota Di Provinsi Banten*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. Viii No. 2 Juli-Desember 2013
- Nur Indah Rahmawati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Pambudi Tri Widodo. (2007). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali)*.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vol 08 No 2.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Renyowijoyo, Muindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, Dedy. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sofyan, M. (2016). Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2015). *Ekonomika*, 9(2), 131-137. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50996012/Pengaruh_Suku_Bunga_Kr

- edit_Modal_Kerja_CAR_dan_LD
R_Terhadap_Kredit_Modal_Kerja.pdf?1482315909=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D
DPengaruh_Suku_Bunga_Kredit_Modal_Kerja_C.pdf&Expires=16087959
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1), 59-77. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47285180/SISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENGELOLAAN_PAJAK_RESTORAN_DALAM_MENINGKATKAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_KOTA_BOGOR.pdf?1468725408=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENG
- Sofyan, M. (2019). Community Satisfaction of the Urban Flood Control System Improvement Project (UFCSI). *Ilomata International Journal of Social Science*, 1(1), 29-34. Retrieved from <https://www.ilomata.org/index.php/ijs/article/view/36/35>
- Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika*, 17(2), 115-121. Retrieved from <http://jurnal.stieimalang.ac.id/index.php/JAK/article/view/173/97>
- Subiyantoro, Heru & Singgih Riphath. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukriy dan Halim Abdullah . (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke-5 cetakan-3, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, M. dan Irawan .(1986). *Ekonomi dan Pembangunan*, Libarty, Yogyakarta.
- Shochrul R, Ajija, dkk. (2011). Cara cerdas menguasai EVIEWS. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta
- Widarjono. Agus . (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta

- Winarno, Wing Wahyu. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA DEPOK. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 1(2), 29-39. Retrieved from <http://www.jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.